

## Buton dan Tradisi Pernaskahan

### Buton and Traditional Manuscripts

ALI ROSDIN

#### ABSTRAK

*Awal mula terjadinya negeri Buton diwarnai dengan mitos, yang berfungsi membentuk suatu pandangan dunia kosmosentris dalam menentukan gambaran-gambaran tentang waktu, ruang, dan masyarakat. Buton sebagai negara kerajaan berlangsung selama lebih dua abad (1327-1541) dan kemudian berlanjut dengan era kesultanan selama lebih dari empat abad (1541-1960). Selama era kerajaan, masyarakat Buton belum mengenal aksara dan tradisi tulis-menulis. Tampaknya, tradisi penulisan naskhah lahir pada era kesultanan, seiring dengan proses Islamisasi oleh para ulama yang memperkenalkan tradisi baca-tulis dengan aksara Arab, yang kemudian dimodifikasi menjadi aksara Buton (Buri Wolio). Kesultanan yang di bangun dengan landasan ajaran agama Islam dan tasawuf ini menerapkan ajaran “martabat tujuh” di dalam struktur kekuasaan pemerintahan. Tradisi pernaskahan ini mencapai puncak keemasan pada masa Sultan XXIX La Ode Muhammad Idrus Kaimuddin (1824-1851), yang dilembagakan dalam sekolah Zawiah. Kini, sekitar 340 buah naskhah terdapat dalam pernaskahan Buton, yang sebahagian besar terdapat pada koleksi Abdul Mulku Zahari. Selain itu, naskhah-naskhah Buton masih dapat ditemukan pada berbagai koleksi peribadi lain, yang jumlahnya sulit ditentukan karena berbagai alasan.*

*Kata kunci: Buton; Islamisasi; tradisi; naskhah; koleksi Abdul Mulku Zahari*

#### ABSTRACT

*The beginning of the country, Buton is filled with myths, which serves to form a cosmocentric world view in determining descriptions of time, space, and society. Buton as a kingdom lasted for over two centuries (1327-1541) and then continued with a sultanate era for more than four centuries (1541-1960). During the era of the kingdom, Buton was not acquainted with script and literary tradition. Apparently, tradition of writing manuscript was firstly known in the sultanate era, when the process of Islamization began by the scholars who introduced the tradition of reading and writing the Arabic script, which was later modified into a Buton script (Buri Wolio). Sultanate built on the basis of ideology of Islam and Sufism applied teachings of “martabat tujuh” on the system and structure of government. The manuscripts tradition achieved its golden peak during the reign of the 29<sup>th</sup> Sultan, La Ode Muhammad Idrus Kaimuddin (1824-1851), which was instituted in a Zawiah school. Today, there are about 340 texts in Buton manuscripts, which are mostly found in the collections of Abdul Mulku Zahari. In addition, there are still many other texts which may be found on various other private collections, which the numbers are difficult to determine because of various reasons.*

*Keywords: Buton; Islamisation; tradition; manuscripts; Abdul Mulku Zahari collections*

#### PENDAHULUAN

Buton merupakan daerah kepulauan yang terletak di jazirah tenggara Pulau Sulawesi dan berada di kawasan timur Indonesia. Secara pentadbiran, daerah ini sekarang merupakan salah satu dari enam belas kabupaten/kota di Provinsi Sulawesi Tenggara. Di daerah ini, terdapat sejumlah peninggalan kebudayaan yang bernuansa Islam dan masih dapat disaksikan hingga sekarang, seperti Masjid Agung Kraton Wolio yang terletak di dalam kompleks Benteng Kraton Wolio, kuburan tua para sultan yang sebahagian besar masih dikeramatkan oleh penduduk setempat, berbagai macam perkakas

kelengkapan kesultanan yang tersimpan di *kamali* (istana bekas kediaman para sultan), dan sejumlah naskhah yang sebahagian besar masih tersimpan di berbagai koleksi peribadi di Bau-Bau, terutama pada koleksi Abdul Mulku Zahari (Ikram et al. 2001).

Sebagai daerah kesultanan, Buton pada masa lampau merupakan wilayah yang marak dengan aktivitas intelektualitas dan ghairah penjelajahan spiritual. Sebegitu besarnya para sultan untuk meniti di jalur sufistik sehingga menginspirasi rakyatnya untuk menuliskan buah-buah fikirannya dalam kitab mahupun warkah-warkah lainnya. Terdapat beratus-ratus naskhah di Tanah Buton. Tradisi penulisan naskhah ini tidak muncul begitu

saja, namun melewati kurun waktu yang panjang dalam sejarah. Menurut Tome Pires (Darmawan 2009:22), posisi Pulau Buton yang terletak di jalur utama perdagangan dunia sejak masa lampau telah menjadikannya sebagai persinggahan banyak ulama yang melintas, baik dalam perjalanan menuju timur maupun saat menuju barat. Pada saat itu, arus peradaban bergerak dari utara yaitu Arab, kemudian ke Melaka, lalu ke selatan dan terus ke arah timur.

Menurut Azra (1994), jaringan antara kalangan Muslim di Timur Tengah dan di Nusantara telah dimulai sejak munculnya hubungan-hubungan dagang yang dibarengi dengan penyebaran agama Islam. Lewat aktivitas dakwah Islam secara ekstensif di Nusantara sejak abad ke-12 hingga abad ke-16, jaringan ini meluas menjadi hubungan politik dan keagamaan. Selanjutnya, paling tidak sejak abad ke-17 jaringan ini telah mulai berubah menjadi hubungan-hubungan agama dan intelektual yang intensif.

Kehadiran orang-orang baru dari tempat lain akan membawa proses transformasi gagasan, sehingga terjadi perubahan aturan dan tata nilai di tempat yang baru, dan karena itu nilai atau hukum senantiasa bersifat *mobile* (bergerak) (Benda-Beckmann et al. 2005). Kehadiran para ulama Nusantara di Buton yang menyebarkan agama Islam telah membawa angin segar bagi lahirnya tradisi tulis-menulis. Islam datang sebagai era baru yang menggantikan masa kegelapan aksara di zaman sebelumnya. Islam memantik lahirnya tradisi pernakawala, yang di masa kini menjadi lumbung informasi masa lampau yang sangat berharga. Datangnya Islam dan diperkenalkannya tradisi menulis dalam huruf Arab, menjadi awal dari dituangkannya catatan-catatan sejarah dan berbagai gagasan dan permasalahan kehidupan terakam dalam khazanah pernakawala Buton.

## RIWAYAT BUTON

Nama Buton atau *Butun* atau *Butuni* sebagai kerajaan diperkirakan telah berdiri sebelum Majapahit menyebutnya sebagai salah satu daerah "*Iking Sasanuasa*" (kesatuan Nusantara) dalam Sumpah Palapa Gajah Mada (Pigeaud 1960: 12; Zuhdi et al. 1996: 3) dan cerita *Galigo* menganggap *Ulio* (Wolio) sebagai saingan dan lawan perang di tengah laut dalam pelayarannya ke Cina pada abad ke-14 (Enre 1999: 31,113). Ketika *Kakawin Nagarakertagama* (1365) mengungkapkan nama *Butun* yang disebut bergandingan dengan Mengkasar dan

Banggawi, daerah itu tentulah sudah berpenghuni dan lebih dari itu bahkan sudah terdapat suatu tatanan sosial politik tertentu. Mulyana (1979: 312) menyebut *Butun* sebagai daerah pengaruh Majapahit yang berstatus 'ke-*resi-an*', yaitu suatu daerah (desa) yang dianggap telah mempertahankan sinkritisme antara agama Hindu yang disebarkan oleh Majapahit dan kepercayaan asli.

Pada umumnya penelusuran mengenai asal usul terbentuknya suatu kerajaan di Nusantara tidak dapat dipisahkan dari mitos (Zuhdi 2007: 2). Demikian pula dengan asal-usul kerajaan Buton. Dalam naskah *Hikayat Sipanjonga* disebutkan bahwa yang pertama mendirikan Kerajaan Buton adalah *Mia Patamiana*, yaitu kelompok yang berpindah ke Buton yang berasal dari Semenanjung Tanah Melayu, Pulau Liyaa, Johor, pada sekitar awal abad ke-13 yang dipimpin Sipanjonga. *Mia Patamiana* secara harfiah berarti "si empat orang" yakni Sipanjonga, Simalui, Sitanamajo, dan Sijawangkati. Pendaratan mereka di Pulau Buton terbagi dalam dua kelompok, yaitu kelompok Sipanjonga dan Simalui yang mendarat di Kalampa dan kelompok Sitanamajo dan Sijawangkati mendarat di Walalogusi. Kedua kelompok itu membangun permukiman di tepi pantai, yang kemudian bergabung membuka suatu permukiman bersama yang dinamakan Wolio. Penggabungan itu mungkin dilakukan dalam upaya untuk menghadapi bajak laut yang sering merampas kepemilikan mereka. Kemudian mereka membentuk sistem pemerintahan tradisional dengan menetapkan empat *limbo* (kampung), yaitu Gundu-Gundu, Barangkatopa, Peropa, dan Baluwu, yang dikenal dengan *patalimbona* (empat kampung) (Taalami 2012: 24).

Ada pula mitos lain yang mengisahkan adanya kelompok yang hidup di pedalaman, yaitu kelompok masyarakat yang dikepalai oleh Dungkucangia. Ia adalah seorang pemimpin kelompok pasukan Kublai Khan yang terpencah akibat serangan balik Raden Wijaya pada awal abad ke-13 (Taalami 2012: 24). Oleh karena perbedaan kepentingan, Sijawangkati dalam suatu waktu berhadapan dengan Dungkucangia untuk mengadu kesaktian. Tidak ada yang kalah-menang dalam perkelahian itu. Mereka kemudian bersepakat untuk membangun kehidupan dengan ikatan persaudaraan yang baru. Dungkucangia yang menguasai kelompok masyarakat Tobe-Tobe bersedia memasukkan wilayahnya ke Wolio, yang kemudian diikuti oleh kelompok masyarakat Kamaru, Wabula, Todanga, dan Batauga. Dengan demikian, maka terbentuklah kerajaan baru, yaitu kerajaan Buton dengan

mengangkat Wa Kaa Kaa sebagai rajanya (Zuhdi 2010: 50-54).

Adapun mitos yang mengisyaratkan adanya unsur kebudayaan “asli” dalam pembentukan kerajaan Buton adalah kisah *Wa Kaa Kaa*. Ia adalah seorang perempuan yang keluar dari “buluh bambu”. Mitos ini memiliki muatan hegemoni kebudayaan Bugis, karena identik dengan konsep *Tomanurung*, manusia yang turun dari langit. Akan tetapi yang menarik disemak juga bahwa *Wa Kaa Kaa* kemudian kahwin dengan *Sibatara*, seorang bangsawan keturunan raja Majapahit (Zuhdi 2007: 2).

Dalam historiografi tradisional Buton, sebutan kerajaan dan raja dimulai dari dua orang perempuan iaitu *Wa Kaa Kaa* sebagai Raja I dan *Bulawambona* sebagai Raja II. Setelah itu raja Buton adalah laki-laki, yakni Bataraguru, Tuarade, dan Raja Mulae. Sejak raja Buton IV Lakilaponto, yang kemudian lebih dikenal dengan Murhum (1541-1587), Islam telah mewarnai kerajaan, hingga kemudian sebutan kerajaan berganti dengan kesultanan dan Lakilaponto dinobatkan sebagai Sultan Buton I. Dengan demikian, Islam telah memberi legitimasi baru bagi Buton atau Wolio (Zuhdi 2007: 3; Niampe 2007: 112).

Mengenai asal-usul nama Buton, terdapat pula beberapa versi dalam penyebutan dan latar belakangnya. Ada yang menyebut nama Buton dengan *Butun*, yang didasarkan atas pertimbangan berkaitan dengan asal-usulnya. Bahawa nama itu telah lebih dahulu ada dikenal (pada masanya) daripada nama Buton sekarang. Penduduk setempat menerima penyebutan atas pulau yang mereka diami dari para pelaut di Kepulauan Nusantara yang sering menyinggahi pulau itu. Yunus (1995: 11) mengungkapkan bahwa *Buton* berasal dari nama jenis pohon, iaitu pohon ‘*butun*’ atau ‘*butu*’, yang dalam ilmu tumbuhan dikenal dengan nama *Barringtonia Asitica* (Anceaux 1987:25). Banyaknya pohon ‘*butun*’ atau ‘*butu*’ di sana membuat para pelaut menyebut *Butun* sebagai penanda untuk pulau itu. Ciri pohon ini agak bengkok, bercabang rendah dekat dengan tanah, tumbuhnya terpecah-pecah di pantai-pantai yang berpasir dan berkarang. Bunganya indah, kayunya lunak, dan mempunyai buah. Jenis pohon ini banyak tumbuh di daerah pesisir pantai bahagian selatan pulau Buton, suatu tempat yang sejak dahulu sering disinggahi kapal-kapal layar.

Dalam *Hikayat Sipanjonga* disebutkan bahwa pada awal abad ke-13 *Mia Patamiana* yang berasal dari Semenanjung Tanah Melayu berpindah ke Butun dan kemudian mendirikan Kerajaan Butun

(Taalami 2012: 24). Jadi, penyebutan nama *Butun* untuk pulau itu sudah ada sebelum orang Majapahit menorehkan nama *Butun* di dalam *Kakawin Nagarakertagama* (1365) sebagai daerah takluknya dalam kerangka ‘pembayar upeti’. Sesudah masa itu, ketika telah berdiri kesultanan, penamaan *Butun* tetap digunakan. Dalam surat-surat perjanjian dengan VOC, sultan menyebut *Butuni* untuk wilayah kekuasaannya (Zuhdi 2007: 37). Tambahan huruf “i” pada akhir kata menunjukkan ciri bahasa Wolio yang *vokoid*, iaitu bahasa yang tidak mengenal konsonan pada huruf akhir sebuah kata. Setiap konsonan pada akhir kata dihilangkan atau ditambah dengan vokal. Orang Bugis/Makassar menyebut *Butun* dengan *Butung*. Nada sengau “ng” terdengar dari mulut mereka jika sebuah kata berakhir dengan konsonan “n”. Sejalan dengan itu, orang Portugis menyebut *Butun* dengan *Butum* atau *Bulgur*. Orang Belanda pula menyebut *Butun* dengan *Butong* (*Bouthong*) atau *Buton* seperti yang kita kenal sampai sekarang.

Selain *Butun*, nama *Wolio* juga dilekatkan pada nama kerajaan ini. Seperti telah dikemukakan bahwa dalam *Hikayat Sipanjonga* terdapat mitos yang mengisahkan tentang migrasi kelompok orang yang datang dari Johor. Kelompok pendatang yang dipimpin oleh Sipanjonga, Simalui, Sitanamajo, dan Sijawanghati yang dikenal dengan *Mia Patamiana* (si empat orang) segera membuka lahan untuk permukiman dengan “membuka” atau “menebang kayu” yang dalam bahasa Wolio bererti “welua”. Dari kata *welia* inilah muncul nama *Wolio*.

Ketika Islam masuk, mitos Butun dan Wolio versi Islam pun tercipta. Nama *Butun* dianggap berasal dari bahasa Arab *butn* atau *bathni* atau *bathin* yang bererti “perut” atau “kandungan”, sedangkan nama *Wolio* bermula dari seorang Musafir Arab yang diperintah Rasulullah Muhammad untuk berlayar ke timur guna mendapatkan sebuah pulau yang telah lama merindukan Islam, dan penduduk setempat menganggapnya sebagai *Waliullah* (Pesuruh Tuhan). Dari kata *Waliullah* inilah kemudian dikenal kata Wolio, sebutan lain untuk kesultanan Buton (Hadad 1863; Ikram et al. 2001:1-2). Dalam naskhah *kabanti Kanturuna Mohelana* (Lampunya Orang Berlayar) diungkapkan:

*Tuamo siy iyaku kupatindamo*  
Demikian itu kubertanya minta kejelasan  
*Ikompona incema uincana*  
Di perut siapa kamu nyata  
*Kâpâka upêlu Butûni*  
Karena engkau suka Butuni  
*Kumânaiya Butûni kokompo*  
Kuartikan Butuni mengandung

*Motoðikana inuncana quru'ani*  
 Yang tertulis di dalam Qur'an  
*Yitumo ðuka nabiyta akõni*  
 Di situlah pula nabi kita bersabda  
*Apaincanamo sababuna tana siy*  
 Menyatakan sebabnya tanah ini  
*Tuamo siy auwalina wolio*  
 Demikian ini awalnya Wolio

*Inda kumondoa kupetula-tulã keya*  
 Tidak selesai kuceritakan  
*Sõ kudingki auwalina yincia siy*  
 Hanya kusinggung awalnya seperti ini  
*Taokana akosaro butûni*  
 Sebabnya bernama Butuni  
*Ambõrasimo pangkati kalangãna*  
 Menempati pangkat yang tinggi

Tentang mitos Wolio dengan versi Islam (Hadad 1863) kisahnya adalah:

“Adalah seorang musafir Arab yang diperintah Nabi Muhammad untuk berlayar ke timur menuju sebuah pulau yang sudah lama merindukan kedatangan Islam. Setibanya di pulau itu, musafir menaruh jubahnya di suatu tempat. Maka jubah itu menjadi perhatian penduduk. Untuk sekian lama mereka ingin tahu siapa pemilik jubah itu. Sementara itu bertengger 7 burung di pohon dekat jubah, sambil menyuarakan bergantian “butuni-butuni-butuni”. Maka bersujudlah orang-orang di sana begitu melihat musafir yang tiada lain adalah “Waliyyullah” (pesuruh Allah). Dari kata Waliyyullah itulah kemudian dikenal kata Wolio”.

Islam masuk ke Buton kira-kira pada abad ke-15. Yunus (1995: 53) mencatat bahwa diperkirakan Islam sudah sampai ke Buton pada masa ketika penguasa Kerajaan Gowa belum memeluk Islam. Hal itu dapat diketahui melalui tradisi-tradisi lokal dan manuskrip Wan Muhammad Shagir yang menulis tentang kedatangan seorang ulama Patani, Syekh Abdul Wahid, di bahagian timur Pulau Buton untuk menyebarkan agama Islam. Namun Islam diterima secara rasmi sebagai agama kerajaan sejak pemerintahan Raja Buton VI Lakilaponto atau Murhum pada tahun 949 Hijrah atau 1541 Masihi. Raja Buton VI memeluk Islam melalui Syekh Abdul Wahid, ulama yang berasal dari Johor. Murhum lalu dilantik sebagai sultan dengan gelar Sultan Kaimuddin, yang ertinya ‘peletak agama’. Versi kedua mengenai masuknya Islam ke Butun adalah pada tahun 1580 ketika Sultan Baabullah dari Ternate memperluas kekuasaannya (Ligtvoet 1878).

Dari kedua versi di atas, orang Butun cenderung menetapkan yang pertama, bahwa Islam masuk pada tahun 1541, tidak langsung dari Ternate tetapi melalui Solor (Zuhdi 2010:103). Agaknya ada semacam bentuk “pengingkaran” atas dominasi kultural dan politik Ternate sehingga ada pengaruh

terhadap tafsir masuknya Islam ke Butun. Sumber tradisional Butun memperlihatkan kesan itu. Dominasi kultural dan politik Ternate atas Butun merupakan kendala struktural yang sulit ditepis. Kendala struktural tersebut dapat dilihat pada naskah *kabanti Kanturuna Mohelana* berikut ini.

*iweitumo osuluthani irumu*  
 di situ sultan di rum  
*beya sapomo itana wolio siy*  
 hendak turun di negeri Wolio ini  
*pogauaka kambotuna bawãngi*  
 membicarakan keputusan dunia  
*iyabakina suluthani talu mia*  
 yang ditanya tiga orang sultan

*otaranate soloro tẽ wolio*  
 Ternate, Solor, dan Wolio  
*tẽmo karona kamondona pata mia*  
 dengan dirinya (sultan Rum) menjadi  
*mõ pata mia suluthani ibawãngi*  
 hingga empat orang sultan di dunia  
*iweitumo ðuniã atoatoromo*  
 di situ dunia diaturlah

*iyarongimo mulaena bawãngi*  
 yang dinamakan mulainya dunia  
*osababuna ðuniã amalusamo*  
 sebabnya dunia sudah usang  
*salapasina pada inciya siytu*  
 setelah selesai demikian itu  
*apogaumo manga pata miayia*  
 berbicalalah mereka berempat

*ãincanamo mulae bawãngi*  
 mewujudkan mulainya dunia  
 .....

Sebagai sumber historiografi tradisional, untaian *kabanti* di atas dapat difahami beberapa hal. Pertama, penyebutan Rum yang dimaksudkan adalah Kesultanan Turki sebagai gejala biasa bahwa pada dunia Melayu ada kecenderungan suatu kerajaan kecil mengaku mempunyai hubungan erat dengan kerajaan atau kesultanan yang lebih besar dan kuat. Dengan disebutkan bahwa “Sultan Rum hendak turun di negeri Wolio” jelas menunjukkan proses legitimasi kekuasaan. Kerajaan besar dan kuat di luar dunia Melayu biasanya yang diacu adalah Kesultanan Rum (Turki) dan Cina, sedangkan untuk kerajaan yang kuat di dalam dunia Melayu adalah Aceh, Minangkabau, Jawa (Majapahit), dan Luwu (Chambert-Loir 1985: 39).

Yang kedua mengenai proses penyetaraan kedudukan Sultan Butuni dengan sultan-sultan yang lain. Bersama dengan “Sultan Rum, Sultan Solor, dan Sultan Ternate”, Sultan Butuni berperan serta dalam “membicarakan keputusan dunia”, dalam kerangka itu “datangnya Islam”. Yang ketiga,

kedatangan Islam di Buton dianggap sebagai “pembeda” antara “zaman lama” dan “zaman baru”, yang dalam kerangka Islam sebagai “pemisah” antara masa “jahiliah” (“kegelapan”) dengan “zaman terang”. Oleh karena semula “dunia sudah usang” maka muncullah “zaman baru” (Zuhdi 2007: 5). Pembuktian mengenai datangnya “zaman baru”, tradisi lokal mengisahkan peristiwa bunuh diri pengikut kelompok Hindu yang kuburannya dipercayai masih dapat dilihat di Batauga, bahagian selatan Buton, yang dikenal sebagai “kuburan Majapahit” (Zahari 1977: 102; Schoorl 1986: 59).

Kedatangan Islam dianggap sebagai datangnya peradaban yang lebih unggul, jadi semacam “*a higher civilization*” daripada peradaban sebelumnya (Abdullah 1993). Namun demikian, tradisi kepercayaan sebelum Islam terus berjalan di dalam masyarakat Buton dan mengalami sintesis dengan Islam yang datang kemudian. Paling tidak sampai tahun 1970-an, Zahari mencatat tentang masih adanya ucapan “*katauna baramana*” (“paham Brahmana”) dari orang tua jika melihat anaknya melakukan tindakan tidak sesuai dengan hukum dan ajaran Islam (Zahari 1977: 51-52).

Masuknya Islam di Buton bukan hanya menjadi awal dari era kesultanan, tetapi juga menjadi awal mekarnya tradisi intelektual. Islam tidak saja dimaknai sebagai sejumlah aturan yang mesti dipatuhi demi menggapai hidup yang lebih baik, tetapi Islam justeru dimaknai sebagai cahaya penerang yang membebaskan suatu masyarakat bangsa dari alam kegelapan menuju alam yang terang benderang. Sebagaimana dikatakan Sultan Muhammad Idrus Kaimuddin (1824-1851), Islam adalah *nuru molabi* (cahaya terang) yang menuntun seorang hamba pada tradisi kearifan, sebuah tradisi untuk menggapai sang Pencipta. Tradisi kearifan inilah yang kemudian melahirkan banyak ulama serta dijelmakan dalam hukum dan tata pemerintahan yang berlaku pada zamannya (Darmawan 2009: 24).

Masyarakat Buton sebelum datangnya Islam tergolong ke dalam buta aksara, warisan pengetahuan dari masa lampau hanya tersimpan dalam ingatan kolektif, tanpa ikhtiar untuk mengabadikannya (Darmawan 2009: 23). Dengan datangnya Islam, masyarakat Buton memiliki akses untuk menjangkau ilmu pengetahuan yang seluas-luasnya. Masyarakat Buton mengalami pencerahan dan menyadari bahawa Kesultanan Buton hanyalah satu noktah kecil dalam luasnya jagat ilmu pengetahuan. Masyarakat Buton menyadari bahawa pengetahuannya tentang jagad

raya dan alam semesta ibarat garis pesisir pantai dari samudera pengetahuan yang pernah diharungi dan diselami oleh para pemikir besar Muslim di sepanjang sejarah.

Gagasan yang masuk seiring dengan datangnya Islam adalah konsep tasawuf sebagaimana tampak dari deretan kitab yang pernah singgah di wilayah ini pada abad ke-15 (Yunus 1995: 86). Pada abad ke-16, orang-orang Buton sudah membaca sejumlah kitab yang beberapa di antaranya adalah khazanah kitab yang masih dikaji hingga kini di semua perguruan tinggi Islam. Dapat dikatakan bahawa globalisasi sudah terjadi di Buton sejak masa lampau dalam beberapa gelombang yang kian tinggi intensitasnya ketika terjadi dialog-dialog dengan berbagai naskah dunia.

Gelombang pertama globalisasi sudah mulai berpijar ketika pada abad ke-13 datang *Mia Patamiana* asal Melayu yang menjadi cikal bakal lahirnya kerajaan Buton. Datangnya mereka dan kehadiran Dungkuchangia serta Wa Kaa Kaa yang diyakini berasal dari Cina kian memperkuat tarikan globalisasi di negeri ini (Zuhdi 2010: 53). Jika globalisasi dimaknai sebagai arena pertautan-pertautan kebudayaan, maka pada abad tersebut sesungguhnya sudah terjadi globalisasi. Gelombang kedua globalisasi adalah datangnya Syekh Abdul Wahid, ulama yang mengislamkan Raja Buton VI dan menggantikan sistem kerajaan menjadi kesultanan.

Datangnya Syekh Abdul Wahid menjadi gerbang pembuka bagi datangnya para ulama dan sufi yang mengajarkan Islam kepada masyarakat. Para ulama tersebut menjadi tokoh penting yang membawa *higher civilization* atau peradaban yang lebih tinggi dan membawa masyarakat dari abad yang gelap dari aksara menuju ke zaman baru penulisan naskah-naskah. Gelombang ketiga adalah datangnya bangsa Eropah seperti Portugis, Inggeris, dan Belanda, yang membawa bangsa Buton dalam pergaulan dengan bangsa-bangsa lainnya. Datangnya mereka adalah awal terintegrasinya Buton ke suasana pergaulan global. Persentuhan dengan bangsa Eropah, meski lebih banyak perihnya, adalah bahagian dari proses perjalanan sebagai bangsa. Sedangkan gelombang keempat hadir ketika bertumpuknya kitab-kitab berbahasa Arab yang intensitasnya makin kuat pada masa Sultan XXIX, La Ode Muhammad Idrus Kaimuddin.

Globalisasi melalui kitab-kitab tasawuf itu didorong oleh para ulama dan sufi yang hilir mudik mengunjungi Buton. Di antaranya adalah

Syarif Muhammad, ulama yang datang pada masa kekuasaan La Elangi, Sultan Dayanu Ikhsanuddin (Sultan Buton IV), pada tahun 1614 M. Ia adalah seorang berkebangsaan Arab yang kemudian membantu Sultan La Elangi untuk merumuskan undang-undang kerajaan secara tertulis yang dinamakan *Murtabat Tujuh*.

Sebagai kerajaan yang tumbuh dari suatu jaringan transmisi ajaran Islam di Nusantara, Buton tidak terlepas dari kegiatan tulis-menulis dan penyebaran hasil-hasilnya. Ikram et al. (2001: 12) mengungkapkan bahwa dari sejumlah teks yang ditemukan dikatakan bahwa sejak awal abad ke-16 dan mencapai puncaknya pada abad ke-17, adalah periode paling penting dalam proses pembentukan tradisi pemikiran Islam. Ketika perdagangan internasional dan antarpulau semakin luas dan kejayaan beberapa kerajaan, antara lain Aceh, Mataram, Banten, Makassar/Gowa-Tallo, dan Ternate, ketika landasan tradisi intelektual dan politik diletakkan, maka usaha salin-menyalin naskah kitab, penyebaran ide-ide keagamaan, antara kerajaan yang dirakam oleh historiografi tradisional merupakan tema utama penciptaan komunitas kognitif Islam dan disusul dengan suasana kosmopolitan. Dalam konteks inilah muncul Aceh sebagai “pusat penghasil” pemikiran cemerlang dalam sejarah pemikiran Islam di Asia Tenggara. Dalam perkembangan kerajaan-kerajaan di Nusantara periode ini, ada kecenderungan pandangan sufistik yang menggambarkan hubungan yang diikat oleh tali kasih, antara “tuan” dan “hamba” dan antara “raja” dan “rakyat”. Landasan pandangan itu mengenai keharusan keharmonian dan kesatuan semesta. Ketika proses perenungan manusia dalam hubungannya dengan sang Khalik, itulah pemikiran makhluk terhadap Khalik, coba dirumuskan. Hamzah al-Fansuri menyusun pemikiran sufistik dengan sebuah sistematika kosmogoni “martabat tujuh” sebagaimana yang ditulis Muhammad Ibn Fad-al-Burhanpuri (1590). Dalam historiografi tradisional, raja dan negara harus dilihat dari pendekatan sufistik, bukan dari sudut pandang fiqh atau syariat. *Sarana Wolio* yang dipengaruhi ajaran tasawuf wujudiyah dengan sistematika kosmogoni “martabat tujuh” adalah undang-undang dasar kerajaan Buton.

*Murtabat Tujuh* adalah salah satu ajaran kebatinan terpenting di dalam tasawuf. *Murtabat Tujuh* adalah kristalisasi pengalaman kebatinan para sufi yakni keyakinan tentang proses kejadian manusia termasuk alam semesta yang bersumber dari zat Allah yang maha suci dan berakhir pada

manusia sempurna (Saidi 2009: 164). Proses itu melalui tujuh tahap atau martabat karena itu disebut *Murtabat Tujuh*. Proses itu turun dari atas (zat Allah) ke bawah (makhluk) iaitu manusia dan alam semesta, selanjutnya dari manusia kembali ke hadirat-Nya sebagaimana tersimpul dalam firman Allah, “*inna lillahi wa inna illaihi raji’un*” yang ertinya ‘sesungguhnya kami milik Allah dan sesungguhnya kepada-Nyalah kami akan kembali’ (Q.S. 2:156). Itulah inti hakikat makna yang terkandung di dalam ajaran *Murtabat Tujuh*. Dalam kaitan inilah, Islam sebagai landasan bernegara di Kesultanan Buton dirumuskan yang memperlihatkan aspek terbentuknya landasan ideologis kerajaan Islam. Hal ini menunjukkan adanya dialog pemikiran keagamaan, kultural, dan ideologis negara yang hendak di bangun.

Pada beberapa tempat di Nusantara, konsepsi *Murtabat Tujuh* juga dikenal mulai abad ke-8 M. dan mengacu pada ajaran sufi besar seperti Abu Yazid al-Bistani, kemudian diperjelas oleh Al-Hallaj (Husain Ibn Mansyur al-Hallaj), seorang sufi yang dieksekusi karena kecintaannya kepada Allah, dan terkenal dengan kalimatnya “akulah kebenaran”. Namun konsep *Murtabat Tujuh* lebih dilukiskan dengan konkrit oleh ulama sufi termasyhur, Ibnu Arabi. Konsep tersebut kemudian diadaptasi oleh beberapa ulama tasawuf seperti Syamsuddin ar-Raniri dari Pasai, Hamzah Fanshuri dari Aceh, Amongraga dari Jawa, dan La Elangi (Sultan Buton IV) (Saidi 2009: 164). Meskipun demikian, di antara bangsa-bangsa yang mengenal tradisi *Murtabat Tujuh* tersebut, hanya bangsa Buton yang menterjemahkan konsep filosofis itu dalam tata aturan pemerintahan, yang mengatur hubungan antara posisi yang satu dengan posisi lainnya. Dilihat dari masa diundangkannya iaitu tahun 1614 M., maka masih lebih tua jika dibandingkan dengan konstitusi Amerika Syarikat iaitu *Virginia Bill of Right* yang lahir tahun 1776 dan ditasbihkan sebagai tahun penting sejarah ketatanegaraan dunia.

*Sarana Wolio* yang digali dari *Martabat Tujuh* berisi sifat kemanusiaan kemudian diperbaharui oleh Sultan Dayanu Ikhsanuddin menjadi *Sara Patânguna* (“Adat Yang Empat”). Keempat *sara* itu adalah: (1) *Sara Wolio* sebagai pusat pemerintahan; (2) *Sara Hukumu* sebagai pusat pelaksana kegiatan dari Hukum Islam (3) *Sara Ārata* sebagai wilayah yang diberi kuasa untuk melaksanakan pemerintahan sendiri (autonomi khusus), iaitu (a) *Ārata Kaledupa* (b) *Ārata Kulisusu*; (c) *Ārata Tiworo*; sedangkan autonomi yang seluas-luasnya adalah (d) *Ārata Wuna* (Muna). Struktur pemerintahan dan kekuasaan

Kesultanan Butuni itu diproyeksikan ke dalam bentuk perahu “*barata*”. *Barata* dalam bahasa Wolio adalah perahu bercadik ganda dengan empat simpul penguat yang diidentifikasi pada dua kerajaan di bahagian barat, iaitu Tiworo dan Muna sedangkan di bahagian timur Kulisusu dan Kaledupa (Muchir 2003: 144-145).

Pelapisan masyarakat di kesultanan didasarkan atas nilai-nilai tradisi lokal dan ajaran Islam, terdiri atas 4 golongan, iaitu *kaomu*, *walaka*, *papara*, dan *batua*. *Kaomu* adalah golongan yang dianggap keturunan langsung dari *Wa Kaa Kaa*, raja perempuan yang memerintah sebelum Islam. Golongan ini dianggap lebih asli di banding yang kedua, *walaka* yang sudah bercampur dengan keturunan mubaligh dari Arab, Abdul Wahab dan Sharif Muhammad. Dari golongan *kaomu* sultan dipilih, sedangkan golongan *walaka* bertugas memelihara undang-undang (*sara*). *Papara* adalah rakyat biasa, sedangkan *batua* adalah orang yang bergantung kepada orang lain apakah sebagai budak atau kerana berhutang.

Kebijakan Sultan La Elangi untuk menjadikan *Murtabat Tujuh* sebagai sumber hukum dalam Kesultanan Buton adalah pilihan yang bijaksana. Di tangannya, *Murtabat Tujuh* menjadi lebih “bertenaga”, tidak sekadar menjadi konsep filosofis yang mencerminkan *intellectual exercise* yang rumit dan memusingkan, namun menjadi konsep yang membumi dan diterapkan dalam tata aturan pemerintahan. Pilihan untuk membumikan konsep *Murtabat Tujuh* ini adalah pilihan yang menunjukkan dialog-dialog antara orang Buton pada masa itu dengan naskhah-naskhah dunia. Ia membaca konsep filosofis tersebut, kemudian menyaksikan realitas pemerintahan di negerinya, lalu menyusun kebijakan untuk menerapkannya sebagai sistem hukum dan disesuaikan dengan tradisi setempat. Naskhah-naskhah dunia yang datang melalui jalur dagang diacu sebagai tesisnya, antitesisnya adalah bentangan pemikiran ulama atau sufi Buton yang membaca kitab luar tersebut, dan sebagai sintesisnya adalah lahirnya berbagai naskhah-naskhah serta syair yang bernuansa tasawuf.

Melalui pembacaan dan tradisi penulisan naskhah, maka sesungguhnya sedang terjadi dialog-dialog dengan naskhah dunia. Dialog yang dimaksudkan di sini bukan hanya situasi ketika dua orang atau lebih sedang berkomunikasi. Dialog adalah gagasan-gagasan yang mengalir saat beberapa pemikiran bertemu dan saling mempertanyakan. Ketika beragam gagasan dari luar datang di negeri ini, maka pemikiran itu mengalami

dialog saat dibaca oleh individu yang berasal dari latar sosial dan tradisi yang berbeza, kemudian melahirkan sintesis berupa gagasan-gagasan yang baru. Pemikiran itu tidak menjadi sesuatu yang beku dan menyelusup begitu saja dalam kesedaran, namun menimbulkan dialog dan lalu lintas gagasan yang lahir saat mempertanyakan dan menguji ulang pemikiran tersebut.

Naskhah-naskhah atau kitab-kitab tersebut dapat pula memberikan cara pandang baru dalam melihat kembali situasi zaman dan menjadi cahaya bagi mereka dalam memecahkan masalah-masalah yang dihadapi, termasuk dalam hal aturan hukum dan sistem hubungan antara unsur dalam pemerintahan. Kitab-kitab itu telah meluaskan pandangan mereka tentang sejauh mana khazanah pengembaraan para sufi di samudera pengetahuan, dan kemudian muncul pula ikhtiar kreatif yang sifatnya dari dalam untuk menerapkan pengetahuan itu dalam skala mikro iaitu Kesultanan Buton. Maraknya tradisi penulisan naskhah itu juga kerana adanya keinginan untuk mengekalkan ingatan, mencatat semua hikmah dari perjalanan panjang bangsa Buton, kemudian mewariskan ingatan itu kepada generasi selanjutnya.

## TRADISI PERNASKAHAN

Peninggalan tulisan berupa naskhah mampu memberikan informasi yang lebih jelas dan lebih luas jika dibandingkan dengan peninggalan masa lampau berupa benda-benda (Subadio 1975: 8). Sebagai peninggalan tulisan, naskhah menyimpan berbagai informasi tentang kehidupan, tentang berbagai buah fikiran, faham, dan pandangan hidup yang pernah tumbuh dan berkembang pada masyarakat masa lampau. Buah budi dengan nilai-nilai yang tersimpan di dalamnya itulah yang telah mengantarkan lahirnya masyarakat saat ini (Chamamah-Soeratno 2011: 4). Apabila dikatakan bahawa kandungan naskhah itu menyimpan berbagai buah fikiran masa lampau, maka hal itu bererti bahawa kandungan naskhah itu dapat berfungsi sebagai cermin masyarakatnya. Dengan demikian, naskhah-naskhah itu dapat menampilkan pandangan masyarakat pada masa lampau tentang dunia (Goldman 1977).

Abad ke-17 di Buton tercatat sebagai abad yang penuh penghargaan pada semua naskhah. Apa pun yang ditulis akan disimpan sebagai dokumen berharga. Bahkan pada saat Belanda menancapkan dominasinya pada bangsa-bangsa di timur, naskhah

berupa surat-surat kerajaan adalah medium utama untuk menyampaikan pesan. Melalui tradisi tulis, Belanda menjalin hubungan dengan berbagai kerajaan, bertukar kata dan menjalin relasi yang kukuh. Melalui tradisi tulis itu pulalah Belanda menunjukkan supremasinya atas bangsa lain. Hal itu dapat dilihat dalam banyak teks perjanjian dengan bangsa lain, misalnya dalam banyak perjanjian, termasuk perjanjian Bungaya yang memutus supremasi Kerajaan Gowa di kawasan timur Nusantara.

Tradisi pernaskahan di Buton terus berlangsung seiring dengan perkembangan Islam, namun intensitasnya kian memuncak pada masa pemerintahan Sultan La Ode Muhammad Idrus Kaimuddin (1824-1851). Pada waktu itu (Zahari 1977; Zaenu 1985; Maliki 1987) kegiatan penulisan naskhah berlangsung sangat pesat, yaitu kebanyakan atas suruhan sultan. Muhammad Idrus Kaimuddin sendiri selain dikenal sebagai sultan dan ulama besar Buton, juga dikenal sebagai seorang pengarang. Salah satu karyanya yang paling populer pada masyarakat pendukungnya adalah *Kabanti Bula Malino* (Bulan yang Tenang), yang telah menjadi sumber inspirasi bagi beberapa penulis (peneliti) dalam mengkaji hubungan hamba dengan Tuhan, seperti dilakukan oleh Malim (1961), Balawa (1994), dan Niampe (1998).

Tradisi penulisan naskhah di Kesultanan Buton disosialisasikan dalam suatu metode pembelajaran yang unik. Sejak tahun 1824, tradisi membaca dan menulis naskhah sudah menjadi bahan kajian dari para intelektual setempat. Melalui tradisi pernaskahan mereka berfikir, berdialog dengan banyak tradisi pemikiran, kemudian berupaya menerapkannya untuk mengisahkan indah pesona pengetahuan. Pada masa Sultan La Ode Muhammad Idrus Kaimuddin, keahlian pernaskahan itu telah dilembagakan dalam pendidikan, yaitu dengan mendirikan sekolah *Zawiah*. *Zawiah* menjadi tempat yang melahirkan cikal-bakal cendekia setempat sebagai penulis naskhah. Hal revolusioner yang terjadi di *Zawiah* adalah memberikan kebebasan kepada siswanya untuk memilih pengetahuan yang mereka senangi untuk diterapkan dalam kesehariannya.

Melalui *Zawiah*, penulisan naskhah diajarkan sebagai pengetahuan yang membebaskan masyarakat dari kegelapan aksara. Tradisi penulisan naskhah menjadi titik terang dalam upaya menuliskan syair-syair dan renungan filosofis. Sebuah naskhah yang utuh tidak sekadar teks yang diam membisu. Sebelum menulis, seorang penulis naskhah

menjalani tirakat dan laku spiritual demi mencapai titik konsentrasi tertentu untuk menuliskan naskhah. Situasinya hampir sama dengan abad pertengahan di Eropah, ketika sebuah karya seni dan karya filsafat didedikasikan untuk memuliakan Tuhan dan dianggap memiliki kekuatan magis (Darmawan 2009: 33). Dalam suasana ini, nafas, cara tutur, sikap, dan cara pandang terhadap sesuatu harus berdasar pada tuntunan dan nilai universal sebagaimana yang terdapat dalam ajaran agama Islam, dalam bahasa Wolio disebut "*apoguru iantona Islamu*" (berguru pada isinya Islam).

Sebagai kerajaan yang bercorak Islam (kesultanan), maka naskhah-naskhah yang dihasilkan di Wolio (Buton) banyak dipengaruhi oleh unsur-unsur Islam. Hal ini dapat dilihat dalam naskhah yang isinya dominan mengandung ajaran agama Islam, penggunaan bahasa Arab, serta penggunaan unsur-unsur serapan dari kosa kata bahasa Arab, di samping bahasa Wolio dan bahasa Melayu. Aksara yang digunakan pun adalah aksara Arab-Melayu yang merupakan adaptasi dari aksara Arab. Aksara Arab-Melayu yang digunakan itu telah dimodifikasi dan disesuaikan pula untuk melambangkan fonem-fonem bahasa Wolio.

Tradisi tulisan huruf Arab yang masuk ke Indonesia bersama dengan agama Islam telah dipakai untuk sastera keagamaan dan juga sastera bukan keagamaan serta tulisan yang bermacam-macam sifatnya dalam bahasa setempat (Teeuw 1982: 11). Aksara Arab sebagai wahana bahasa Melayu dengan berbagai adaptasi dan modifikasi, pada suatu kurun waktu, telah memperoleh tempat yang mantap sebagai cara untuk merakam berbagai bahasa di Nusantara (Ikram 1997: 38). Adaptasi dan modifikasi aksara Arab bukan hanya terhadap bahasa Melayu, tetapi juga bahasa-bahasa daerah lain di Asia Tenggara seperti bahasa Aceh, Jawa, Sunda, Bugis, Wolio, Tausug, Magindanao, Maranao di Filipina Selatan, dan sebagainya, yang oleh Kawashima daerah-daerah lain di luar Melayu yang menggunakan aksara Arab itu disebut sebagai "Jawi non-Melayu/Indonesia" (Yamaguchi 2007:45). Jika aksara Arab yang diadaptasi dan dimodifikasi dalam bahasa Melayu disebut huruf Jawi, dan di Jawa disebut dengan huruf pegon, maka di Buton disebut *Buri Wolio*.

Tradisi peninggalan tulisan di Buton dapat dilihat dari beberapa aspek, yaitu (1) penulis sebagai pengarang, (2) penulis sebagai pengalih bahasa atau penyadur karangan, dan (3) penulis sebagai penyalin. Tradisi peninggalan tulisan itu berupa surat-surat kesultanan, naskhah tasawuf dan agama



Islam, hingga naskah tentang pengobatan. Naskah yang juga banyak dihasilkan adalah naskah sastra yang terdiri atas beberapa syair dan hikayat. Saat ini, sebahagian besar warisan peninggalan tulisan Buton itu tersimpan pada koleksi Abdul Mulku Zahari di Baubau, ANRI dan Perpustakaan di Jakarta dalam bentuk mikrofilm, dan terdapat sejumlah naskah di beberapa negara Eropah, terutama Belanda.

### KOLEKSI NASKAH BUTON

Salah satu warisan budaya dari sejarah masyarakat di Kepulauan Nusantara adalah hasil tulisan yang umumnya berupa tulisan tangan atau disebut naskah. Dapat dikatakan bahwa naskah merupakan bukti peninggalan masa lampau dari suatu peradaban yang berasal dari masyarakat tertentu. Dari sekian banyak masyarakat suku bangsa di Nusantara tidak semua memiliki tradisi tulis. Di Buton, naskah sebahagian besar tertulis dalam bahasa Arab, Melayu, dan Wolio, dengan menggunakan aksara Arab dan Latin. Sebahagian yang lain naskah-naskah di Buton ditulis dalam bahasa Belanda dan Jepun.

Kerajaan Buton diperkirakan berdiri pada awal abad ke-13 dan berakhir pada tahun 1960 (Zuhdi et al. 1996). Islam yang merupakan landasan kehidupan masyarakat dan politik kerajaan, yang masuk di Buton sekitar tahun 948 Hijrah atau tahun 1542 Masihi. Catatan sejarah yang dapat diketahui bahawa pada tahun 1613, Sultan Buton yang bernama Dayanu Ikhsanuddin (1595-1615) telah melakukan perjanjian persahabatan dengan VOC. Selanjutnya, Zuhdi et al. (1996) menjelaskan bahawa dokumen autentik itu sendiri sudah tidak ada lagi kecuali yang dicetak sebagai terbitan sumber yang terhimpun dalam *Corpus Diplomaticum Neerlandico Indicum*. Perjanjian kedua, antara pihak kesultanan Buton dan VOC berlangsung pada tahun 1667. Menurut Ikram et al. (2001), dilihat dari formatnya surat perjanjian itu terdiri atas dua bagian yang tertulis dalam bahasa Belanda dan Jawi dengan posisi sebelah menyebelah. Dilihat dari bentuk itu, maka tulisan tangan itu juga termasuk ke dalam kategori naskah.

Sebagai kerajaan yang tumbuh dari suatu jaringan transmisi ajaran Islam di Nusantara, Buton tidak terlepas dari kegiatan tulis-menulis dan penyebaran hasil-hasilnya. Dari sejumlah teks yang ditemukan dikatakan bahawa sejak awal abad ke-16 dan mencapai puncaknya pada abad ke-17, adalah jangka masa paling penting dalam

proses pembentukan tradisi pemikiran Islam. Islam memberikan pencerahan spiritual dan keghairahan intelektual dengan ilmu pengetahuan yang seluas-luasnya dan menggiatkan usaha salin-menyalin kitab dalam kerangka penyebaran ide-ide keagamaan.

Secara material, naskah-naskah Buton yang telah berabad-abad itu tidak lagi dapat bertahan lama, tetapi turunannya dapat diperoleh sebagai yang disalin kembali pada abad ke-19. Dilihat dari naskah yang ada sekarang, kebanyakan naskah di Buton berasal dari masa pemerintahan Sultan Muhammad Idrus Kaimuddin (1824-1851).

Sultan La Ode Muhammad Idrus Kaimuddin sendiri dikenal sebagai pengarang yang cukup produktif dengan tema tasawuf dan ajaran Islam, karyanya antara lain *kabanti Bula Malino* (Bulan yang Tenang), *Tadzikiiri Mamampodona* (Zikir yang Pendek), *kabanti Nuru Molabina* (Cahaya yang Lebih), *kabanti Jaohara Molabina* (Permata yang Lebih), dan *kabanti Kanturuna Mohelana I* (Lampu Orang Berlayar) serta *Kanturuna Mohelana II* (Lampu Orang Berlayar). Periode itu merupakan masa yang menunjukkan banyaknya naskah yang disalin atau ditulis baru. Dari periode itu pula terhimpun sejumlah besar naskah yang diketahui hingga sekarang (Zahari 1977: 29; Niampe 1998: 47-48).

Pada zaman pemerintahan kesultanan, menyalin naskah hasil karya orang lain merupakan salah satu tugas pokok yang dibebankan sultan kepada sekretaris kesultanan dan para pejabat tinggi kesultanan, terutama pejabat di bidang keagamaan dalam lingkungan kraton Buton (Yunus 1995: 75). Hasil salinan di maksud selain menjadi arsip kesultanan, juga menjadi pedoman bagi kalangan pejabat kesultanan dan guru-guru agama serta para tokoh adat.

Kegiatan pernaskahan di Buton dapat dikelompokkan dalam tiga kategori (Niampe 1998:49), iaitu (1) penulis sebagai pengarang, antara lain naskah *kabanti Bula Malino* (Bulan yang Tenang) dan *kabanti Jaohara Molabina* (Permata yang Lebih) oleh La Ode Muhammad Idrus Kaimuddin, *kabanti Kaluku Panda* (Kelapa Pendek) oleh La Kobu, dan *kabanti Ajonga Inda Malusa* (Pakaian yang Tidak Luntur) karya H. Abdul Ganiu; (2) penulis sebagai pengalih bahasa atau penyadur karangan, antara lain *Tula-tulana Ana-ana Moelu* dialih bahasakan dari *Hikayat Si Miskin* oleh La Ode Nafiu, *Kitabi Masala Sarewu* dialih bahasakan dari *Kitab Seribu Masalah* oleh H. Abdul Ganiu, *Tula-tulana Raja Indara Pitarâ* dialih bahasakan dari *Hikayat Raja Indra Putra* oleh Abdul

Khalik; dan (3) penulis sebagai penyalin, seperti Abdul Mulku Zahari menyalin *kabanti Bula Malino* (Bulan yang Tenang), *kabanti Ajonga Inda Malusa* (Pakaian yang Tidak Luntur), *kabanti Kanturuna Mohelana* (Lampu Orang Berlayar), dan *kabanti Kaluku Panda* (Kelapa Pendek); Moersidi menyalin *kabanti Bula Malino* (Bulan yang Tenang), *kabanti Kanturuna Mohelana* (Lampu Orang Berlayar), *kabanti Ajonga Inda Malusa* (Pakaian yang Tidak Luntur), dan *kabanti Kaluku Panda* (Kelapa Pendek); dan La Mbalangi menyalin *kabanti Ajonga Inda Malusa* (Pakaian yang Tidak Luntur), *kabanti Bunga Dalima* (Bunga Delima), dan *kabanti Kaluku Panda* (Kelapa Pendek).

Ikram et al. (2001) mengelompokkan naskhah-naskhah Buton menurut kategori atau jenis teksnya sebagai berikut: (1) Islam, adalah naskhah yang berisi teks-teks tentang tarekat, tasawuf, ajaran-ajaran Islam lainnya, dan salinan naskhah kitab suci al-Quran. Kebanyakan naskhah ditulis dengan huruf Arab berbahasa Arab, sebahagian lagi ditulis dengan huruf Arab-Melayu bahasa Wolio (*Buri Wolio*) dan huruf Arab (Jawi) berbahasa Melayu; (2) Bahasa, adalah naskhah yang isinya berupa teks tentang pelajaran bahasa Melayu yang diambil dari tata bahasa Arab; (3) Hikayat, adalah teks yang berisi cerita tentang, tokoh tertentu; (4) Hukum, yakni naskhah yang teksnya tentang masalah peraturan pembayaran pajak, hukum adat, hukum Islam, dan sebagainya; (5) Ubat-ubatan, yaitu naskhah yang teksnya berisi tentang pengobatan tradisional; (6) Primbon, yaitu semua naskhah yang teksnya berisi tentang ilmu perbintangan, kemujuran, dan kemalangan berdasarkan perhitungan tradisional dan tabir mimpi; (7) Sejarah, ialah naskhah yang berisi segala macam cerita sejarah dan legenda, sejak asal mula berdirinya kerajaan Buton; (8) Salasilah, yakni naskhah yang berisi secara eksplisit terfokus pada salasilah; (9) Surat-surat, adalah naskhah yang semua teksnya berbentuk surat, baik surat peribadi mahupun surat formal, seperti surat menyurat kenegaraan dan surat antar pejabat mengenai soal pemerintahan; (10) Upacara Adat, yaitu naskhah yang teksnya berisi upacara perkahwinan sesuai adat Buton; dan (11) Lain-lain, yakni naskhah yang teks-teksnya tidak dimasukkan dalam kategori-kategori tersebut, seperti teks yang isinya mengenai kuitansi dan pas jalan, dan sebagainya.

Struktur kekuasaan di Kesultanan Buton di topang oleh dua golongan bangsawan *kaomu* dan *walaka*. Sultan dipilih/ditetapkan oleh *walaka* dan *kaomu*. *Walaka* adalah golongan yang memegang adat dan pengawas pemerintahan yang dijalankan

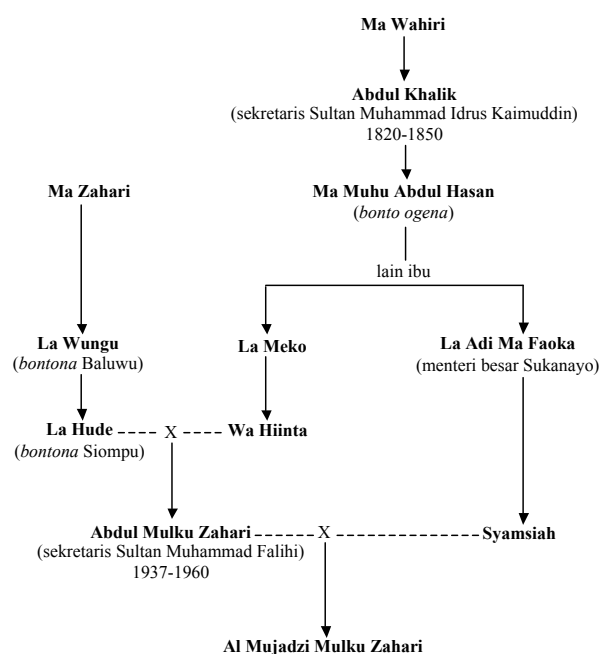
oleh sultan. Di tangan golongan *walaka* inilah naskhah dijaga dan dipelihara.

Pada prinsipnya, naskhah kesultanan atau keluarga sultan tidak diwariskan melainkan diberikan kepada orang yang dianggap mampu memeliharanya. Namun demikian, ketentuan itu tidak sepenuhnya benar. Sebab ketika hubungan keluarga antara pihak-pihak pemegang naskhah semakin jauh, maka diusahakan untuk mempertemukannya melalui tali perkahwinan. Hal itu terlihat pada hubungan perkahwinan antara Abdul Mulku Zahari dengan Syamsiah Ma Faoka. Abdul Mulku Zahari adalah anak mantu La Adi Ma Faoka. Hubungan keluarga antara keduanya adalah demikian: Ibu dari Abdul Mulku Zahari adalah sepupu dengan Syamsiah. Jika tidak dipertautkan antara Abdul Mulku Zahari dengan Syamsiah, maka anak Abdul Mulku Zahari dengan anak Syamsiah akan bertambah jauh asal-usulnya. Dari kedua keturunan inilah naskhah Buton banyak dijumpai sekarang (lihat salasilah Abdul Mulku Zahari dan Syamsiah Ma Faoka).

Pada saat ini jumlah terbesar naskhah Buton berada pada koleksi keluarga Abdul Mulku Zahari, yang berada di Baadia, Kraton Wolio, Baubau. Naskhah-naskhah tersebut telah diinventarisasi oleh Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI) pada tahun 1978 dan 1984, Ikram et al. (2001) dalam bentuk katalog, dan Niampe et al. (1999) dalam bentuk penelitian (inventarisasi dan pencatatan). Dalam koleksi tersebut, terdapat sejumlah 299 naskhah, Abdul Mulku Zahari sendiri memiliki 119 naskhah dan Syamsiah Mulku Zahari (isterinya) memiliki 180 naskhah. Dalam inventarisasi ANRI yang berupa mikrofilem, terdapat 340 naskhah, termasuk 41 naskhah arsip kraton Wolio (Ikram et al. 2001: 11). Sekarang koleksi Almarhum Abdul Mulku Zahari dirawat dan dipelihara oleh anaknya Al mudjazi Mulku Zahari.

Selain koleksi Abdul Mulku Zahari, naskhah-naskhah Buton masih dapat ditemukan pada berbagai koleksi peribadi, antara lain (1) koleksi La Mbalangi (78 tahun) di Kelurahan Tarafu Kecamatan Betoambari Kota Bau-Bau. Ia adalah mantan Kepala Kantor Departemen Agama Kecamatan Wolio Kabupaten Buton; (2) koleksi Moersidi (73 tahun) di Kelurahan Wajo Kecamatan Betoambari Kota Bau-Bau. Ia adalah pensiunan pegawai Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Kecamatan Wolio Kabupaten Buton; (3) koleksi La Ode Aegu (80 tahun) di Kelurahan Tomba Kecamatan Wolio Kota Bau-Bau. Pekerjaan pemilik naskhah adalah petani, di samping sebagai Imam Masjid Kraton Wolio; dan (4) koleksi La Ode Anshari Idris (68 tahun) di

Kelurahan Batulo Kecamatan Sorawolio Kota Bau-Bau. Pemilik naskah adalah pensiunan pegawai Departemen Penerangan Kabupaten Buton.



RAJAH 1 Silsilah Abdul Mulku Zahari dan Syamsiah Ma Faoka (Ikram et al. 2001: 8)

Naskah-naskah yang masih tersebar di kalangan masyarakat secara perseorangan sulit ditentukan atau diperkirakan jumlahnya karena adanya faktor-faktor berikut. Pertama, naskah-naskah tersebut banyak yang telah berpindah tangan, kadang-kadang sampai lebih dari dua kali dari pemegang naskah semula. Dalam proses penelusurannya sering terjadi jalan buntu, karena pemegang naskah yang baru tidak lagi diketahui asal-usul pemiliknya. Banyak informasi tentang adanya beberapa naskah Buton di tempat tertentu, tetapi kenyataannya tidak dapat ditemukan naskah tersebut di tempat itu karena telah hilang, rusak, hancur, atau karena sebab lain. Kedua, secara tidak terduga sering dijumpai naskah Buton di tempat-tempat tertentu yang sebelumnya tidak diperoleh keterangan atau informasi tentang keberadaan naskah tersebut. Ketiga, naskah-naskah itu ternyata banyak yang tidak diperkenankan oleh pemiliknya untuk diteliti, bahkan tidak boleh dilihat. Hal ini disebabkan pemiliknya menganggap naskah-naskah itu merupakan benda keramat yang memiliki kekuatan ghaib. Mereka takut ditimpa bencana bila naskah tersebut diberikan atau dibaca orang lain pada sembarang waktu atau

sembarang orang. Keempat, naskah-naskah itu ada yang dirahsiakan oleh pemiliknya karena berisi ajaran leluhurnya yang dianggap tidak semua orang dapat mengetahuinya, atau karena sebab lain. Oleh karena dirahsiakan, maka naskah-naskah itu disimpan di dalam peti, kemudian peti itu ditanam, dan setelah dibuka dalam kurun waktu yang cukup lama, naskah-naskah tersebut ternyata telah dimakan anai-anai atau ngengat sehingga dapat menyebabkan kehancuran naskah (Niampe et al. 1999: 8).

Naskah-naskah Buton ditulis dengan menggunakan bahan alas kertas. Kertas yang digunakan pun bermacam-macam, antara lain kertas Eropah dan kertas Jawa (*dhaluwang*). Tinta dan pena yang digunakan umumnya masih tradisional. Tinta yang digunakan terbuat dari jelaga kayu *dama-dama* (sejenis kayu damar) yang dicampur dengan arak (sejenis minuman keras yang berasal dari air enau yang diwapkan), dan penanya terbuat dari kalam enau yang di runcing agak tajam, bulu ayam bagian pangkal, atau kadang-kadang dengan menggunakan kuku jari telunjuk kanan.

## KESIMPULAN

Pada umumnya penelusuran mengenai asal usul terbentuknya suatu kerajaan di Nusantara tidak dapat dipisahkan dari mitos (Zuhdi 2007: 2). Masyarakat pada masa lampau begitu kuat memiliki kesadaran kolektif mengenai dunia dan alam semesta, yang membentuk suatu pandangan dunia kosmosentris (*a cosmoscentric world-view*) dalam menentukan gambaran-gambaran mereka tentang waktu, ruang, dan masyarakat (Kartodirdjo 1988: 53). Keyakinan bahwa Buton adalah termasuk “perut dunia (Islam)” merupakan pembentukan mitos tersebut. Negeri yang tercipta dari *bura satongka* (setitis buih) dengan raja pertamanya Wa Kaa Kaa yang keluar dari “buluh bambu” ini merupakan bentuk tradisi lisan yang dapat bercerita tentang mitos kosmogenik mahupun asal-usul nenek moyang (*myth of common origins*).

Hilir mudiknya sejumlah sufi dan para wali di Buton tampaknya tidak dapat dipisahkan dari jaringan transmisi ajaran Islam di Nusantara (Azra 1994). Karakteristik dan potensi geografi, demografi, serta sosioekonomi Buton tidak memperlihatkan kuatnya aspek-aspek perdagangan, justeru gejala yang lebih tampak adalah pemusatan negara dan moralistik. Pengaruh “martabat tujuh” di Aceh terlihat di Buton, bahkan diterapkan di dalam

struktur kekuasaan kesultanan Buton. Kesultanan Buton di bangun dengan landasan ajaran agama Islam dan tasawuf (Zuhdi 2010:276).

Buton sebagai negara kerajaan berlangsung selama lebih 2 abad (1327-1541) dan era kesultanan selama lebih dari 4 abad (1541-1960). Dalam rentang waktu selama era kerajaan, masyarakat Buton belum mengenal aksara dan tradisi tulis-menulis. Warisan pengetahuan dari masa lampau hanya tersimpan dalam ingatan kolektif, tanpa ikhtiar untuk mengabadikannya (Darmawan 2009: 23). Peristiwa-peristiwa sejarah dan sosial kemasyarakatan yang terjadi hanyalah dirawihkan secara turun-temurun dari satu generasi ke generasi berikutnya.

Masyarakat Buton sebelum datangnya Islam tergolong ke dalam buta aksara, Dengan datangnya Islam, masyarakat Buton memiliki akses untuk menjangkau ilmu pengetahuan yang seluas-luasnya. Masyarakat Buton mengalami pencerahan dan menyadari bahwa Kesultanan Buton hanyalah satu noktah kecil dalam luasnya jagat ilmu pengetahuan. Masyarakat Buton menyadari bahwa pengetahuannya tentang jagat raya dan alam semesta ibarat garis pesisir pantai dari samudera pengetahuan yang pernah diharungi dan diselami oleh para pemikir besar Muslim di sepanjang sejarah.

Pernaskahan Buton tampaknya lahir pada era kesultanan, seiring dengan proses Islamisasi yang memperkenalkan tradisi baca-tulis dengan aksara Arab, yang kemudian dimodifikasi menjadi aksara Buton (*Buri Wolio*). Karena pengaruh agama Islam yang maju pesat dan dinyatakan sebagai agama negara, maka mulailah bermunculan para penulis dari generasi ke generasi dengan menggunakan bahasa Wolio, Melayu, dan Arab. Tulisan mereka meliputi berbagai pengetahuan seperti hukum, tata negara, pemerintahan, sejarah, sastra, sosial budaya, budi pekerti, agama Islam terutama yang bernuansa tasawuf, dan lain-lain. Karya-karya mereka itulah yang kemudian menghiasi koleksi pernaknahan di Buton.

Pada umumnya naskah-naskah tersebut masih tersimpan sebagai koleksi pribadi secara turun-temurun dan masih tertutup bagi orang lain di luar lingkungan keluarga. Satu-satunya koleksi naskah yang terbuka bagi umum khususnya bagi para peneliti adalah naskah yang dimiliki keluarga Almarhum Abdul Mulku Zahari, yang saat ini dijaga dan dirawat oleh anaknya, Almuzaji Mulku Zahari. Naskah-naskah Buton yang tersimpan di Leiden, Belanda telah pula dihadirkan di Buton

dalam bentuk mikrofilm pada tahun 2004. Dilihat dari masa penulisannya, naskah tertua pada pernaknahan Buton adalah naskah Martabat Tujuh sebagai Undang-Undang Dasar Kesultanan Buton yang ditulis pada tahun 1610.

#### RUJUKAN

- Abdullah, Taufik. 1993. The formation of political tradition in the Malay World. Dlm. *The Making of an Islamic Political Discourse in Southeast Asia*, disunting oleh Anthony Reid. Monash Paper on Southeast Asia No. 27.
- Anceaux, J.C. 1987. *Wolio Dictionary* (Wolio-English-Indonesian). Dordrecht – Holland/Providence-USA: Foris Publication Holland.
- Azra, Azyumardi. 1994. *Jaringan Ulama Timur Tengah dan Kepulauan Nusantara Abad XVII & XVIII: Melacak Akar-akar Pembaruan Islam di Indonesia*. Bandung: Mizan.
- Balawa, La Ode, et al. 1994. *Ungkapan Religiositas dalam Kabanti Oni Wolio* (Laporan Penelitian). Kendari: Universitas Haluoleo.
- Benda-Beckmann, K. von, Franz von Benda-Beckmann & Anne Griffiths (eds.). 2005. *Mobile People, Mobile Law: Expanding Legal Relations in a Contracting World*. London: Ashgate Publishing.
- Chamamah-Soeratno, Siti. 2011. *Sastra: Teori dan Metode*. Yogyakarta: Jurusan Sastra Indonesia FIB UGM – Program S2 Ilmu Sastra FIB UGM – Penerbit Elmatara.
- Chambert-Loir, Henri. 1995. *Syair Kerajaan Bima*. Jakarta: EFEO.
- Darmawan, M. Yusran, sunt. 2009. *Naskah Buton, Naskah Dunia*. Bau-Bau: Respect.
- Enre, Fachruddin Ambo. 1999. *Ritumpuna Wélenrénggé: Sebuah Episoda Sastra Bugis Klasik Galigo*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.
- Goldman, L. 1977. *Towards a Sociology of the Novel*. London: Routledge and Kegan Paul.
- Hadad, Akbar Maulana Sayid Abdul Rahman. 1863. *Sejarah Terjadinya Negeri Buton dan Negeri Muna*. Disalin dan disusun kembali oleh La Ode Muhammad Ahmadi dkk. (t.t.). Bau-Bau, Buton.
- Ikram, Achadiati. 1997. *Filologia Nusantara*. Jakarta: Pustaka Jaya.
- Ikram, Achadiati et al. 2001. *Katalog Naskah Buton Koleksi Abdul Mulku Zahari*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.
- Kartodirdjo, Sartono. 1988. *Pengantar Sejarah Indonesia Baru 1500-1900*, I. Jakarta: Gramedia.
- Ligtvoet, A. 1878. Beschrijving en Geschiedenis van Boeton. *Bijdragen tot de Taal-, Land-en Volkenkunde* 26:1-112.
- Maliki, La Ode. 1987. *Masyarakat Wolio*. Kendari: Rusa Mas.
- Malim, La Ode. 1961. *Membara di Api Tuhan*. Jakarta: Proyek Penerbitan Buku Sastra Indonesia dan Daerah Depdikbud.
- Muchir, L.A. 2003. *Sara Patânguna: Memanusikan Manusia Menjadi Manusia Khalifatullah di Bumi Kesulthanan Butuni*. Tarafu-Baubau.
- Mulyana, Slamet. 1979. *Negara Kertagama dan Tafsir Sejarahannya*. Jakarta: Bharata.
- Niampe, La. 1998. *Kabanti Bula Malino: Kajian Filologis Sastra Wolio Klasik*. Bandung: Tesis Universitas Padjadjaran.

- Niampe, La. 2007. *Undang-Undang Sarana Wolio: Suntingan Teks disertai dengan Telaah Filosofis Aspek Mistiknya*. Bandung: Disertasi Universitas Padjadjaran.
- Niampe, La et al. 1999. *Naskah Buton: Inventarisasi dan Pencatatan (Laporan Penelitian)*. Kendari: Manassa Cab. Buton – Bappeda Tingkat II Buton.
- Pigeaud, T.H. 1960. *Java in de Century a Study in Cultural History*. Djakarta: KITLV.
- Saidi, E.A. 2009. Naskah sebagai sumber kekayaan dunia: Sebuah deskripsi dari aspek historis. Dlm. Yusran Darmawan (ed.). *Naskah Buton, Naskah Dunia*. Baubau: Respect.
- Schoorl, J.W. 1986. "Power, Ideology and Change in the Early State of Buton", in *Fifth Dutch-Indonesian Historical Congress*. Lage Vuursche: The Netherlands.
- Soebadio, Hariyati. 1975. "Penelitian Naskah Lama di Indonesia", dalam *Yaperna* (Tahun VII No. II). Jakarta.
- Taalami, La Ode. 2012. *Hikayat Negeri Buton (HNB): Analisis Jalinan Fakta dan Fiksi dalam Struktur Hikayat dan Fungsinya serta Edisi Teks*. Bandung: Disertasi Universitas Padjadjaran.
- Teeuw, A. 1982. *Khazanah Sastra Indonesia: Beberapa Masalah Penelitian dan Penyebarluasannya*. Jakarta: Balai Pustaka.
- Yamaguchi, H. K. 2007. Manuskrip Buton: Keistimewaan dan nilai budaya. *Sari* 25: 41-50.
- Yunus, A. R. 1995. *Posisi Tasauf dalam Sistem Kekuasaan di Kesultanan Buton pada Abad Ke-19*. Jakarta: Indonesian – Netherlands Cooperation in Islamic Studies.
- Zaenu, La Ode. 1985. *Buton dalam Sejarah Kebudayaan*. Surabaya: Suradipa.
- Zahari, A. M. 1977. *Sejarah dan Adat Riy Darul Butuni*. Jilid I, II, dan III. Jakarta: Proyek Pengembangan Media Kebudayaan Depdikbud.
- Zuhdi, S. 2007. "Perahu yang Berlayar di Antara Karang-Karang Kesultanan Butuni (1491-1960)", dalam <http://www.melayuonline.com>, © 2007 melayuOnline.com (Diakses 15 Januari 2010).
- Zuhdi, S. 2010. *Sejarah Buton yang Terabaikan: Labu Rope Labu Wana*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Zuhdi, S. et al. 1996. *Kerajaan Tradisional Sulawesi Tenggara: Kesultanan Buton*. Jakarta: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan.

Ali Rosdin

Dosen Prodi Kajian Budaya

Program Pascasarjana Universitas Haluoleo

Jl. R. Suprpto No. 33A Kendari 93111

Sulawesi Tenggara

INDONESIA.

E-mail: aros\_ayang@yahoo.com

